

ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN MASYARAKAT PROVINSI BANTEN TAHUN 2015-2019

Asna Mufida^{1*}, Sitti Retno Faridatussalam²

^{1,2}Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jawa Tengah, Indonesia
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartusuro Telp (0271) 717417 Surakarta - 57102

*Corresponding Author:
Email: asnamufida7@gmail.com

Abstract.

The Purpose of the research is to measure the influence of the GRDP, HDI, Minimum Wage and Special Allocation Funds on absolute poverty. With the aid of the Eviews 9 software, the panel data regression analysis method and also the Fixed Effect Model methodology were used in this study. The Central Statistic Agency (BPS) provide the information for the research. The study's findings display that the GRDP has a significant impact on poverty rate, the Human Development Index does not have a massive effect on poverty level, that is an increase in HDI does not always result in a decrease in poverty level, the Minimum Wage has a significant impact on poverty level, and Funds the Special Allocation has no major effect on the poverty rate of the people of Banten provincial in 2015-2019.

Keyword: Poverty, GRDP, HDI, Minimum Wage, Special Allocation Funds, Fixed Effect Model

1. PENDAHULUAN

Setiap negara, baik negara miskin, negara yang sedang berkembang maupun sudah maju tidak lepas dengan isu kemiskinan. Masalah kemiskinan sangat berdampak bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara yang harus diperhatikan pemerintah. Pengeluaran pembangunan ekonomi akan signifikan di negara dengan tingkat kemiskinan yang kuat, hal ini akan menghambat pemulihan PDB. Kemiskinan merupakan standar tingkat hidup yang buruk atau rendah, yang berarti bahwa kekayaan materi dalam masyarakat atau diantara beberapa kelompok lebih sedikit daripada standar kehidupan yang berlaku. Kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah diantara orang miskin, dan upah yang lebih rendah karena kurangnya keterampilan semuanya secara langsung dipengaruhi oleh standar hidup yang rendah. Dilihat dari sisi bidang ekonomi terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan yang pertama, pola pemikiran sumber daya yang tidak seimbang dan menyebabkan pendistribusian pendapatan tidak merata akan menimbulkan kemiskinan. Kedua, selisih dalam kualitas SDM antara penduduk satu dengan penduduk lain. Ketiga, kemiskinan terjadi karena perbedaan modal yang didapat.

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat telah mencoba menerapkan program dan kebijakan untuk mengurangi kemiskiskinan tetapi, masalah kemiskinan belum dapat ditangani. Program dan kebijakan yang diterapkan belum memberikan manfaat yang terbaik. Program dan kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan masih terdapat ketimpangan antara rencana dan tujuan yang akan dicapai. Berkurangnya penduduk yang hidup dalam kemiskinan merupakan tanda kemajuan ekonomi suatu negara. Indonesia adalah negara berkembang yang dimana jumlah penduduk miskin tidak dapat dihindarkan. Banyak daerah di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah krusial yang belum mampu diatasi oleh pemerintah. Badan Pusat Statistik Indonesia memperkirakan sekitar 22,75 juta orang Indonesia akan hidup dalam kemiskinan yang parah pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, Provinsi Banten yang terletak di bagian ujung barat pada pulau Jawa berpenduduk sekitar 13,16 juta jiwa dengan luas wilayah 9,663 km². Pada Maret 2022, sebesar 6,16 persen penduduk di Provinsi Banten tergolong miskin. Menurun sebesar 0,50 persen dibandingkan Maret 2021 dan sebesar 0,34 persen pada September 2021. Provinsi Banten mungkin masih mengalami kemiskinan meskipun sudah mengalami penurunan.

Tabel 1
 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Banten

No.	Kab./Kota	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kab. Pandeglang	10,4	9,6	9,7	9,6	9,4
2.	Kab. Lebak	9,9	8,7	8,6	8,4	8,3
3.	Kab. Tangerang	5,7	5,2	5,3	5,1	5,1
4.	Kab. Serang	5,0	4,5	4,6	4,3	4,0
5.	Kota Tangerang	5,0	4,9	4,9	4,7	4,4
6.	Kota Cilegon	4,1	3,5	3,5	3,2	3,0
7.	Kota Serang	6,2	5,5	5,5	5,3	5,2
8.	Kota Tangerang Selatan	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6
Prov. Banten		5,9	5,4	5,4	5,2	5,0

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Sesuai angka kemiskinan provinsi Banten dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan dan penurunan. Dengan persentase 5,9 persen, provinsi Banten memiliki tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2015. Turun secara drastis menjadi 5,4 persen pada tahun 2016. Mengalami pertumbuhan sebesar 0,03 persen atau menjadi 5,4 persen pada tahun 2017 dan turun masing-masing sebesar 5,2 persen dan 5,0 persen pada tahun 2018 dan 2019. Kelangkaan sumber daya untuk memenuhi tuntutan pekerjaan secara berhasil dan efisien terutama pendapatan merupakan salah satu faktor tingkat kemiskinan. Pemerintah yang berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan harus menetapkan kebijakan yang dapat menekan angka kemiskinan.

Langkah pemerintah untuk mengatasi kemiskinan antara lain dengan menaikkan gaji masyarakat melalui upah minimum yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor penting dalam mengurangi kemiskinan adalah pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia menggambarkan taraf hidup bagi masyarakat untuk mengatur kehidupan yang dapat diterima untuk memenuhi kebutuhan. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi yang akan berdampak pada tabungan dan investasi. Investasi besar sehingga perekonomian tumbuh berkembang dan kemiskinan akan berkurang. Efektivitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomin. PDRB merupakan ukuran penting dari pembangunan ekonomi suatu daerah. (Nabawi, 2020), tujuan PDRB adalah membantu pemerintah merumuskan kebijakan atau strategi daerah, mengevaluasi pembangunan dan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan komponen penting untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah dengan segala kebijakannya harus dapat mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu negara terutama mengenai terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kebijakan UU No. 33 tahun 2004 (semula UU No. 22 tahun 1999) tentang otonomi daerah oleh pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan dapat mempengaruhi pendapatan perkapita. Pemerintah berupaya dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan berbagai program pembiayaan dengan mengalokasikan dana APBN/APBD. APBN mengalokasikan uang yang disebut Dana Alokasi Khusus ke tempat-tempat tertentu dengan tujuan membiayai inisiatif khusus yang merupakan masalah daerah yang sejalan dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus digunakan secara efektif untuk membantu menekan angka kemiskinan di suatu masyarakat.

Dari uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan penduduk provinsi Banten selama tahun 2015 hingga 2019 yang diukur dengan PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum dan Dana Alokasi Khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah menginformasikan pengelola provinsi Banten agar dapat mengembangkan tempat dengan mengurangi kemiskinan.

II. METODE

Dengan menggunakan kombinasi data *cross section* dan *time series* pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yang dilakukan dengan menggunakan program *EViews 9*. Data sekunder adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Banten. Data deret waktu mencakup tahun 2015 hingga 2019. Data *cross section* untuk Kabupaten/Kota di provinsi Banten. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Dana Alokasi Khusus. Kemiskinan adalah variabel independen. Dengan model ekonometrik (estimator) data panel sebagai berikut:

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 UMK_{it} + \beta_4 DAK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

POV : Kemiskinan (%)
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)
IPM : Indeks Pembangunan Manusia (%)
UMK : Upah Minimum Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)
DAK : Dana Alokasi Khusus (Juta Rupiah)
 ε : *error* (faktor kesalahan)
 β_0 : *intercept*
 $\beta_1 \dots \beta_4$: koefisien regresi variabel independen
i : entitas ke-i
t : periode ke-t

Pemilihan model regresi data panel, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Kemudian model estimasi akan dilakukan uji chow untuk menguji model antara CEM dan FEM, uji hausman merupakan pengujian yang dilakukan untuk model regresi terbaik antara FEM dan REM, dan uji langrange multiple untuk menentukan antara model regresi REM dan CEM.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Chow

Uji f statistik diterapkan pada uji chow untuk menentukan model yang paling signifikan diantara model *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 2
Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section	121.675968	(7,28)	0,0000
Cross-section Chi-Square	137.896502	7	0,0000

Sumber: Analisis diolah menggunakan program *EViews 9*

Nilai probabilitas f ditentukan sebesar 0,0000 dengan taraf signifikansi α 5%. Dengan asumsi hipotesis H_0 : Model yang dipilih CEM dan H_A : Model yang dipilih FEM. Hipotesis nol dibantah karena probabilitas f adalah (0,0000) dengan tingkat signifikansi signifikansi α (0,05). Hasilnya, *Fixed Effect Model* (FEM) dipilih.

Uji Hausman

Uji Hausman adalah pengujian yang dilakukan untuk memilih model *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Random Effect Model* (REM).

Tabel 3
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	26.423500	4	0.0000

Sumber: Analisis diolah menggunakan program *EViews 9*

penelitian Uji Hausman menunjukkan bahwa χ^2 statistik memiliki probabilitas 0,0000 dengan signifikansi α 5%. Dengan dasar pengambilan keputusan H_0 : Model yang dipilih REM ; H_A : Model yang dipilih FEM. Berdasarkan keputusan yang diambil hipotesis nol tidak diterima karena nilai probabilitas f $(0,0000) \leq$ signifikansi α $(0,05)$. Jadi model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Berdasarkan pengujian uji chow dan uji hausman menentukan bahwa model yang dipilih yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Sedangkan Uji langrange multiple tidak digunakan untuk menentukan model terbaik karena sudah menunjukkan bahwa dalam pengujian uji chow dan uji hausman, *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model terbaik diantara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Sehingga disimpulkan bahwa pendekatan model terbaik yang akan digunakan dalam menentukan pengaruh dan hubungan PDRB, IPM, UMK, dan DAK terhadap Kemiskinan Masyarakat Provinsi Banten Tahun 2015-2019 ialah ***Fixed Effect Model* (FEM)**.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factor (VIF) diterapkan pada uji multikolinearitas untuk menentukan apakah model regresi memiliki masalah multikolinearitas. Model memiliki masalah multikolinearitas jika VIF variabel independen > 10 dan tidak memiliki masalah multikolinearitas apabila VIF variabel independen ≤ 10 .

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Var.	Uncetered VIF	Centered VIF
C	11.87872	378.9476	NA
PDRB	7.09E-17	8.116123	2.069234
IPM	0.002805	449.3343	3.133716
UMK	1.83E-13	52.83909	2.248168
DAK	2.84E-18	6.829277	1.766396

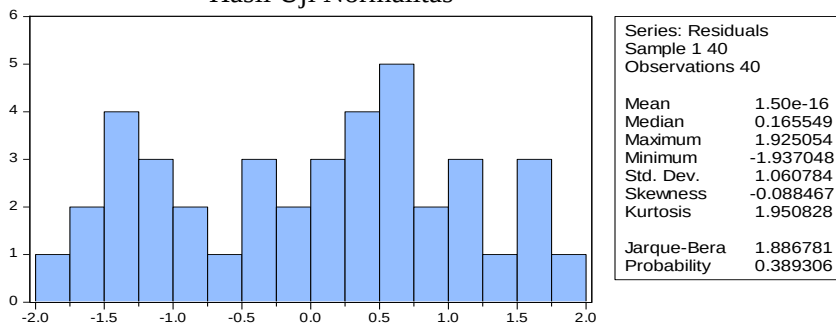
Sumber: Analisis diolah menggunakan program *EViews 9*

Dari tabel Uji Multikolinearitas menunjukkan nilai variabel indenpenden ≤ 10 . Sehingga tidak memiliki masalah multikolinearitas antara variabel indenpenden dengan model regresi panel.

Uji Normalitas Residual

Uji Normalitas Residual menentukan apakah model regresi mengandung variabel perancu dan residual yang terdistribusi normal. Dalam uji normalitas terdapat pengambilan keputusan sebagai berikut: H_0 : distribusi *residual* yang normal dan H_A : distribusi reidual yang tidak normal. Karakter uji apabila nilai prob. *Jarque-Bera* $> \alpha$ 5% , maka H_0 diterima dan jika nilai prob. *Jarque-Bera* $\leq \alpha$ 5%, H_0 ditolak.

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Analisis diolah menggunakan program *EViews 9*

Nilai probabilitas *Jarque-Bera* yaitu (0,389306) $>$ signifikansi α (0,05). Kesimpulannya adalah *residual* berdistribusi secara normal berasal dari asumsi hipotesis nol.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji apakah terdapat variasi *varians* dan *residual* dari satu sample ke sample berikutnya dilakukan uji heteroskedastisitas dengan metode *Breus-Godfrey*. Terdapat ssumsi hipotesis H_0 : menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas, tetapi H_A : menunjukkan ada. Uji heteroskedastisitas memiliki ciri bahwa H_0 diterima jika nilai prob. f statistik $> \alpha$ (0,05) dan ditolak jika nilai prob. f statistik $\leq$ signifikansi α (0,05).

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.314577	Prob. F (4,35)	0.8663
Obs*R-squared	1.388159	Prob. Chi-Square(4)	0.8463
Scaled explained SS	0.505274	Prob. Chi-Square(4)	0.9730

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 11/14/22 Time: 13:07

Sample: 1 40

Include observation: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-statistik	Prob.
C	-	3.458560	-	0.9999
PDRB	0.000595	8.45E-09	0.000172	0.5387
IPM	5.25E-09	0.053151	0.620958	0.6456
UMK	0.024659	4.30E-07	0.463947	0.4916
DAK	-2.99E-07	1.69E-09	-	0.9282
	-1.53E-10		0.695127	-
			0.090794	

R-Squared	0.034704	Mean dependent	1.097131
Adjusted R-square	-	var	1.083446
S.E. of regression	0.075616	S.D. dependent	3.187532
Sum squared resid	1.123662	var	3.398642
Log likelihood	44.19159	Akaike info criterion	3.263863
F-statistic	-	Schwarz criterion	1.217154
Prob(F-statistic)	58.75064	Hannan-Quinn criter.	
	0.314577	Durbin-Watson stat	
	0.866286		

Sumber: Analisis diolah menggunakan program Eviews 9

Hasil uji heteroskedastisitas *Breus-Godfrey*, hipotesis nol disetujui karena nilai prob. statistik $f(0,8662) > \text{signifikansi } \alpha(0,05)$ yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Data Panel

Tabel 6
Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable POV

Method: Panel Least Square

Date: 11/16/22 Time: 12:38

Sample: 2015 2019

Periods included: 5

Cross-section included: 8

Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.92853	10.99470	1,721606	0.0962
PDRB	4.98E-08	2.31E-08	2.156853	0.0398
IPM	-0.192073	0.166654	-	0.2589
UMK	-7.53E-07	3.90E-07	1.152524	0.0637
DAK	-8.95E-10	6.50E-10	-	0.1793
			1.930625	
			-	
			1.377389	

Effects Spesification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-square	0.994419	Mean dependent	5.510750
Adjusted R-Squared	0.992226	var	2.533226
S.E. of regresion	0.223349	S.D. dependent var	0.083164
Sum square resid	1.396775	Akaike info	0.589827
Log likelihood	10.33673	criterion	0.266357
F-statistic	435.5454	Schwarz criterion	1.378332
Prob(F-statistic)	0.000000	Hannan-Quin criter	
		Durbin-Watson stat	

Sumber: Analisis diolah menggunakan program *EViews 9*

Sesuai dengan tabel 6 model regresi di atas dapat digunakan untuk menuliskan *Fixed Effect Model*:

POV = 18,92853 + 4,98E-08 PDRB - 0,192073 IPM – 7,53E-07 UMK - 8,95E-10 + e...

Dari hasil persamaan yang diperoleh dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta bernilai positif sebesar 18,92853 artinya menunjukkan pengaruh yang positif antara kemiskinan dan PDRB, IPM, UMK, dan DAK.

Angka PDRB adalah 4,98E-08 , artinya setiap kenaikan PDRB sebesar 1 juta rupiah, kemiskinan sebesar 4,98 persen. Di sisi lain, angka kemiskinan akan turun sebesar 4,98 persen untuk setiap 1 juta rupiah penurunan PDRB. Dengan asumsi bahwa umsur-umsur lain tetap konstan atau tetap.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah -0,192073, artinya setiap kenaikan IPM sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan berkurang sebesar 0,19%. Sebaliknya jika IPM turun 1%, maka angka kemiskinan akan naik sebesar 0,19%. Dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain tetap statis atau tetap.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar -7,53E-07, artinya setiap peningkatan UMK 1 juta rupiah, tingkat kemiskinan berkurang sebesar 7,53 persen. Di sisi lain, kemiskinan akan tumbuh sebesar 7,53 persen untuk setiap 1 juta rupiah jatuhnya UMK. Dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain tetap konstan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar -8,95E-10, artinya setiap pertumbuhan DAK sebesar 1 juta rupiah, maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 8,95 persen. Di sisi lain kemiskinan akan meningkat sebesar 8,95 persen untuk setiap penurunan DAK sebesar 1 juta rupiah. Dengan asumsi bahwa faktor lain konstan atau tetap.

Uji Signifikansi Model (Uji F)

Untuk menentukan apakah variabel independen memiliki efek terhadap variabel dependen, uji f sering digunakan untuk mendeteksi pengaruh tersebut. Asumsi H_0 : variabel dependen secara bersama-sama dipengaruhi oleh variabel dependen namun dibawah asumsi H_A : tidak ada hubungan. Sesuai kriteria pengujian, hipotesis nol disetujui jika probabilitas statistik $f \leq \alpha 5\%$, dan ditolak jika probabilitas statistik $f > \alpha 5\%$.

Berdasarkan tabel 6 H_0 diterima jika nilai probabilitas statistik dengan tingkat signifikansi (0,05). Artinya, Stingkat kemiskinan penduduk provinsi Banten dipengaruhi oleh gabungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) antara tahun 2015-2019.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 berkisar dari 0 sampai 1. Jika R^2 mendekati 1, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat lebih mudah dijelaskan. Kemampuan menjelaskan bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat akan berkrana apabila R^2 mendekati nol.

Hasil yang diperoleh nilai *adjusted* R^2 berdasarkan tabel 6 sebesar 0,994419, artinya 99% variasi tingkat kemiskinan masyarakat provinsi Banten tahun 2015-2019

dipengaruhi oleh PDRB, IPM, UMK, dan DAK. Sisanya sebesar 1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat pada model regresi.

Uji Parsial (Uji t)

Untuk menetapkan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen, digunakan dengan uji t. dengan asumsi bahwa:

H_0 : terdapat pengaruh secara individu variabel independen terhadap variabel dependen

H_A : tidak terdapat pengaruh secara individu variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan karakteristik pengujian apabila nilai probabilitas $\leq$ signifikansi α , H_0 gagal ditolak dan nilai probabilitas $>$ signifikansi α , H_0 ditolak.

Tabel. 7
 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Prob.t-stat	Keterangan
PDRB	0,0398	t-stat $\leq$ 0,05 ; ada pengaruh PDRB terhadap kemiskinan
IPM	0,2589	t-stat $>$ 0,10 ; tidak ada pengaruh IPM terhadap kemiskinan
UMK	0,0637	t-stat $\leq$ 0,10 ; ada pengaruh UMK terhadap kemiskinan
DAK	0,1793	t-stat $>$ 0,10 ; tidak ada pengaruh DAK terhadap kemiskinan

Pengaruh PDRB terhadap kemiskinan

Berdasarkan tabel. 6 menunjukkan nilai koefisien sebesar 4,98E-08 dan nilai probabilitas 0,0398 signifikan terhadap α 5% , berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara PDRB dengan tingkat kemiskinan masyarakat provinsi Banten tahun 2015-2019. Hasil penelitian terdahulu oleh (Susanti, 2013) menunjukkan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini terjadi disebabkan adanya kemungkinan bahwa PDRB secara langsung dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan.

Pertumbuhan PDRB merupakan faktor penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi harus dinilai tidak hanya dinilai dalam hal PDRB tetapi juga perkembangan distribusi upah atau pendapatan masyarakat. Potensi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya meningkat seiring dengan tingkat pendapatan masyarakat.

Pengaruh IPM terhadap kemiskinan

Hasil regresi menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia terlihat memiliki koefisien sebesar -0,192073 dan nilai probabilitas 0,2589 dimana nilai probabilitas tidak signifikan terhadap α 10% , artinya Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap angka dan tingkat kemiskinan provinsi

Banten tahun 2015-2019. Hasil penelitian mendukung penelitian sebelumnya oleh (Leonita & Sari, 2019) menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh yang terlalu berarti terhadap tingkat kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia dapat dideskripsikan ke dalam beberapa kategori aspek yaitu pertama, aspek indeks harapan hidup yang belum terjangkau secara global. kedua, aspek pendidikan yang belum terdistribusi adil untuk dirasakan masyarakat miskin dan penduduk yang hidup di daerah terpencil serta aspek standar hidup layak yang masih belum terpenuhi oleh masyarakat miskin. Temuan penelitian ini terbukti variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak berkontribusi secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Pengaruh UMK terhadap kemiskinan

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berdasarkan tabel 6 hasil regresi menunjukkan nilai koefisien $-7,53E-07$ dan probabilitas sebesar $0,0637$ signifikan terhadap $\alpha 10\%$, ini menunjukkan bahwa UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat provinsi Banten tahun 2015-2019. Temuan terdahulu yang dilakukan oleh (Niswati, 2014) menjelaskan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Upah Minimum Kabupaten/Kota ditentukan menurut standar kehidupan layak (KHL). Penetapan UMK didasarkan pada kenaikan inflasi, tingkat produktivitas dan penawaran pegawai atau tenaga kerja. Penelitian ini menjelaskan secara langsung upah minimum dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Kenaikan upah minimum akan mendorong konsumsi masyarakat dan akan muncul usaha-usaha baru untuk memenuhi konsumsi masyarakat sehingga akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran dan menekan angka kemiskinan.

Pengaruh DAK terhadap kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 6 Dana Alokasi Khusus (DAK) koefisien bernilai $-8,95E-10$ dan probabilitas $0,1793 > 10\%$, artinya DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Berbeda dengan temuan penelitian terdahulu yang digarap oleh (Fitriyanti & Handayani, 2020) menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif pada kemiskinan.

Dana APBN adalah dasar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk memberikan dana kepada daerah untuk membangun sarana prasarana serta kegiatan daerah. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak selalu berkontribusi pada tingkat kemiskinan sebab pemerintah kurang efektif dan efisien dalam melakukan pengalokasian dana.

IV. KESIMPULAN

Kemiskinan merupakan standar tingkat hidup yang buruk atau rendah, yang berarti bahwa kekayaan materi dalam masyarakat atau diantara beberapa kelompok lebih sedikit daripada standar kehidupan yang berlaku. Masalah kemiskinan sangat berdampak bagi pertumbuhan pembangunan perekonomian suatu negara yang harus diperhatikan

pemerintah. Pemerintah telah mencoba menerapkan program dan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan tetapi, masih terdapat ketimpangan antara rencana dan tujuan yang akan dicapai.

Berdasarkan temuan penelitian, pengaruh dapat disimpulkan sebagai berikut: PDRB dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) secara signifikan mempengaruhi tingkat dan angka kemiskinan penduduk Provinsi Banten tahun 2015-2019. Sebaliknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan, artinya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Dana Alokasi Khusus tidak selalu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan masyarakat Provinsi

REFERENSI

- Annur, R. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal*, 409-426.
- B., A. Y., Hariani, D., & Panggabean, H. L. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Inverting Tahun 2015-2019. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 2200-2208.
- Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economic*, 79-90.
- Giovanni, R. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Economic Development Analysis Journal*, 23-31.
- Herawaty, R., Tambun, & Monang S., J. (2018). Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Menggunakan Regresi Data Panel. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 100-110.
- Leonita, L., & Sari, R. K. (2019). Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 1-8.
- Nabawi, H. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Kota Malang. *OECONOMICUS Journal Of Economics*, Volume 4, No. 2 , 104-117.
- Niswati, K. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2011. *Jurnal Eko-Regional*, 82-89.